

## Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Kota Yogyakarta

Oleh :  
A. Woro Tri Sejati  
5150111314

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan unsur yang penting dan menjadi perhatian pemerintah daerah karena Barang Milik Daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Maka Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengelolaan barang milik daerah (BMD). Tujuan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui tentang Penatausahaan dan Pengkodefikasian Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Penatausahaan di Inspektorat Kota Yogyakarta terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yang prosesnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Namun dalam pelaksanaan pengkodefikasian belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. Melalui tugas akhir ini penulis memberikan usulan pengkodefikasian barang milik daerah.

Kata Kunci : Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Inspektorat Kota Yogyakarta

*Analysis of the Implementation of the Administration of Regional Property at the  
Yogyakarta City Inspectorate*

*A. Woro Tri Sejati  
5150111314*

*Regional Property Management is an important element and is of concern to the regional government because Regional Property is goods that are purchased or obtained at the expense of the Regional Budget (APBD) or derived from other legal acquisition. So the regional government must manage regional property properly and can be accounted for in the form of regional property management report (BMD). The purpose of the final assignment report is to find out some condition related to the Administration and Coding of Regional Property in the Yogyakarta City Inspectorate. The method used in this research is descriptive qualitative method. Administration in Yogyakarta City Inspectorate consists of Bookkeeping, Inventory and Reporting, the process of which is in accordance with Minister of Domestic Affairs Regulation Number 19 of 2016, but in the implementation of coding not in accordance with Minister of Domestic Affairs Regulation No. 108 of 2016. Through this final assignment, the writer gives a proposal for coding regional property.*

*Keywords: Administration, Regional Property, Regional Property Management,  
Yogyakarta City Inspectorate*